

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas - tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan tersebut diperlukan dukungan teknis, administrasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat I.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administatif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan **Sekretariat Jenderal** dan **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI)** serta **satuan kerja vertikal di lingkungan BPSDMI yaitu unit pendidikan (sekolah menengah kejuruan dan politeknik) dan balai diklat industri.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I memiliki tugas:

1. Melaksanakan kegiatan *assurance* dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar tugas dan fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan di tempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2020 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana

Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan strategi kebijakan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat I pada tahun 2020 adalah:

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian dan Isu Strategis Pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
5. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas; dan
6. Menerapkan audit berbasis risiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari:

1. Subbagian Program dan Tata Usaha
Subbagian Program dan Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana,

program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

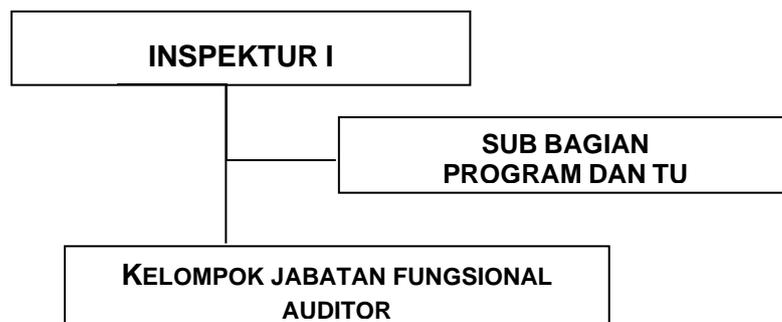
Subbagian Program dan Tata Usaha (TU) secara tugas dan fungsi bertanggung jawab langsung kepada Inspektur I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I**. Dengan program/kegiatan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat I Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	7 Laporan
2.	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I	58 Laporan
3.	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	1 Laporan
4.	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	1 Laporan
5.	Layanan Audit Internal Inspektorat I	1 Layanan

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2020 semula memperoleh anggaran sebesar Rp 3.400.000.000,-. Sampai dengan triwulan IV Inspektorat I mengalami beberapa kali revisi pemotongan anggaran akibat pandemik Covid 19, sehingga anggaran menjadi **Rp 1.701.273.000,-**

Pada tahun 2020 terdapat perubahan target pada kegiatan monev menjadi 1 kegiatan dan ada penambahan sub kegiatan pada kegiatan *Consulting*, yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2020

KODE	Uraian Program / Kegiatan / Output / Jenis Belanja	VOLUME	JUMLAH (Rp,-)
1841	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I		1.701.273.000
1841.001	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	7 Laporan	196.300.000
1841.001.051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	1 Laporan	18.760.000
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat I		15.380.000
B	Penyusunan Anggaran Inspektorat I Tahun 2021		3.380.000
1841.001.052	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas	5 Laporan	6.760.000
A	Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya		3.380.000
B	Koordinasi dan Penyusunan LAKIP Inspektorat I		3.880.000
1841.001.053	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya	1 Laporan	170.780.000
A	Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat I		170.780.000
1841.002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I	58 Laporan	587.170.000
1841.002.051	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		586.170.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu		36.380.000
B	Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (LK-BMN)		527.470.000

C	Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)		22.320.000
1841.002.052	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Cakupan Tugas Inspektorat I		1.000.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKBMN		1.000.000
1841.003	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	1 Laporan	1.000.000
1841.003.051	Monev SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		1.000.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP		1.000.000
1841.004	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	1 Laporan	183.540.000
1841.004.052	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi		65.838.000
A	Koordinasi Pendampingan/Pengawasan Kegiatan Berisiko Tinggi dan Pembinaan Pengawasan Kinerja		1.400.000
B	Pelaksanaan Pendampingan/Pengawasan Satuan Kerja		24.626.000
C	Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Kinerja oleh Pimpinan		39.638.000
D	Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko		62.116.000
E	Pengawasan Pelaksanaan Program Percepatan Penanganan Covid 19		55.760.000
1841.965	Layanan Audit Internal	1 Layanan	733.263.000
1841.965.052	Pelaksanaan Audit Internal		629.151.000
A	Koordinasi Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri		17.880.000
B	Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri		611.271.000
1841.003.053	Pelaksanaan Audit Khusus		11.800.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu		11.800.000

1841.003.054	Tindak Lanjut Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP		79.812.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit		79.812.000
1841.003.055	Reviu Perencanaan Anggaran		12.500.000
A	Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKAKL		12.500.000

Pada triwulan IV sama dengan triwulan III yaitu adanya kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Program Percepatan Penanganan Covid 19, sehingga terdapat realokasi penyesuaian anggaran pada Program/kegiatan Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi cakupan tugas Inspektorat I dan Layanan Audit Internal

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan informasi capaian Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2020, terdapat penyesuaian target pada Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,5%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IK	10%

		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	80%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	80%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	LEVEL 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Hasil yang Telah Dicapai

Total anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2020 setelah beberapa kali revisi sebesar Rp. 1.701.273.000, - terdiri dari:

Tabel 4. Anggaran Inspektorat I Tahun 2020

No.	Kode	Uraian Program dan Kegiatan	Jumlah (Rp,-)
	1841	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	1.701.273.000
1.	1841.001	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	196.300.000
2.	1841.002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I	587.170.000
3.	1841.003	Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	1.000.000
4.	1841.004	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	183.540.000
5.	1841.965	Layanan Audit Internal	733.263.000

Realisasi Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 sesuai aplikasi PP39 telah mencapai 86,76% atau sebesar Rp. 1.476.024.455,- dari target 100,00%. Sesuai dengan aplikasi *e-Monitoring* yang bersumber dari aplikasi Analisa Laporan Kegiatan Internal (ALKI), realisasi anggaran Inspektorat I pada Triwulan IV telah mencapai 87,08% atau sebesar Rp. 1.481.468.528,- dari target 100,00%, namun sesuai dengan aplikasi *e-Monitoring* APBN sampai

dengan akhir Desember 2020, realisasi anggaran Inspektorat I pada Triwulan IV telah mencapai 99,37% atau sebesar Rp. 1.690.554.980,- dari target 100,00%, Sedangkan dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) realisasi Inspektorat I pada Triwulan IV telah mencapai 99,69% atau sebesar Rp. 1.695.999.054,- dari target 100,00%.

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *e-Monitoring* APBN dan aplikasi SAS yang disebabkan karena adanya beberapa realisasi anggaran Inspektorat I yang belum selesai diinput oleh Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Realisasi fisik kegiatan Inspektorat I telah mencapai 99,37% dari target sebesar 100,00%. Hasil ini dicapai karena seluruh kegiatan yang mencakup Audit, Reviu LK-BMN dan Reviu RKA-KL, Monev, *Consulting* dan Layanan Manajemen telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I Triwulan IV sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan Ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV			
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	
1	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	196.300.000	19,81	53.472.120	27,24	99,69	188.075.030	95,81	0,31	8.224.970	4,19
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	587.170.000	0,17	998.189	0,17	99,10	582.648.791	99,23	0,90	4.521.209	0,77
3	Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	1.000.000	0	0	0	100,00	1.000.000	100,00	0	0	0
4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	183.540.000	30,38	44.453.388	24,22	99,99	140.004.312	76,28	0,01	43.535.688	23,72
5	Layanan Audit Internal	733.263.000	85,38	195.707.895	26,69	99,33	564.319.205	76,96	0,67	168.943.795	23,04
Total		1.701.273.000	42,42	294.660.484	17,32	99,37	1.476.024.455	86,76	0,63	225.248.545	13,24

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I Triwulan IV sesuai Aplikasi e – *Monitoring*

Jenis Kegiatan		PAGU Anggaran	Triwulan IV			Sisa Anggaran	
			Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Jumlah (Rp,-)	%
1	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I	196.300.000	99,69	195.852.900	99,77	447.100	0,23
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	587.170.000	99,10	582.634.730	99,23	4.535.270	0,77
3	Monev Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0	0
4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	183.540.000	99,99	182.600.400	99,49	939.600	0,51
5	Layanan Audit Internal	733.263.000	99,33	733.144.643	99,98	118.357	0,02
Total		1.701.273.000	99,37	1.695.232.673	99,65	6.040.327	0,35

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 6. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,5%	0,15%	Realisasi Anggaran Kemenperin: Rp.3.368.036.653.338,00 temuan BPK: Rp.4.967.582.710,63, maka batas toleransi temuan material: 0,15%, telah mencapai target
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IK	10%	0%	Satker yang tidak dapat menindaklanjuti belum ada, jadi tidak ada temuan
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	80%	100%	Sampai dengan Triwulan IV tidak ada pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti Inspektorat I
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	80%	61%	Total rekomendasi satker cakupan tugas Inspektorat I 111 rekomendasi, dari jumlah SR dan BSR

						sebanyak 182 rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	3	Belum dapat diukur	Masih dalam proses mengevaluasi data/informasi
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%	97,2%	Stakeholder menyatakan pelaksanaan kegiatan pengawasan telah memenuhi standar pengawasan
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%	100%	Pelaksanaannya berkoordinasi dengan Set.Itjen
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%	100%	Kegiatan Reviu LKBMN RKAKL, RKBMN & PIPK, Monev Sakip, Audit internal pada unit Pusat dan vertikal, Consulting telah dilaksanakan sesuai dengan PKPT
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%	100%	Kegiatan Reviu, Audit, Monev, Consulting dan Mankin sesuai dengan perannya

Sesuai data di atas, capaian kinerja untuk sasaran program/kegiatan **Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inpektorat I

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, nilai temuan finansial Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp. 4.967.582.710,63 dari total realisasi anggaran sebesar Rp. 3.368.036.653.338,00 sehingga diperoleh batas toleransi material pengawasan eksternal adalah 0,15%.

Indikator kinerja ini telah mencapai target di bawah 1,5% yaitu sebesar 0,15%.

Untuk menunjang indikator kinerja ini kegiatan pendukung yang dilakukan pada Inspektorat I yaitu Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL tahun anggaran 2021, Reviu LKBMN semester II tahun anggaran 2019 dan semester I tahun anggaran 2020, Reviu PIPK tahun anggaran 2019, Reviu RKBMN tahun anggaran 2022, *Consulting* berupa Pendampingan/Pengawasan kegiatan Berisiko Tinggi serta Pembinaan Pengawasan Kinerja oleh Pimpinan.

Kegiatan Reviu dilaksanakan pada seluruh satker cakupan tugas Inspektorat I sebanyak **30 satker pusat dan vertikal** terdiri dari **2 unit Pusat**: Sekretariat Jenderal dan BPSDMI; **12 politeknik** yaitu STMI Jakarta, APP Jakarta, AKA Bogor, STTT Bandung, PTKI Medan, ATI Padang, ATK Yogyakarta, ATI Makassar, AKOM Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, Poltek Industri Logam Morowali dan Poltek Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal; **9 SMK** yaitu SMAK Bogor, SMAK Padang, SMAK Makassar, SMTI Banda Aceh, SMTI Makassar, SMTI Yogyakarta, SMTI Bandar Lampung, SMTI Padang dan SMTI Pontianak; serta **7 BDI** yaitu BDI Jakarta, BDI Medan, BDI Padang, BDI Yogyakarta, BDI Surabaya, BDI Makassar dan BDI Denpasar. Kegiatan dilaksanakan dengan kunjungan langsung ke satker dan via *online*. Laporan hasil reviu telah disampaikan kepada satker masing-masing.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Layanan Audit Internal pada 19 satker cakupan tugas Inspektorat I yaitu; 2 unit Pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan BPSDMI; 5 sekolah menengah yaitu SMAK Bogor, SMAK Makassar, SMTI Bandar Lampung, SMTI Yogyakarta dan SMTI Makassar; 8 politeknik yaitu SMTI Jakarta, APP Jakarta, AKA Bogor, STTT Bandung, ATK Yogyakarta, ATI Makassar, AKOM Surakarta dan IFPK Kendal; serta 4 balai diklat industri yaitu BDI Jakarta, BDI Yogyakarta, BDI Surabaya dan BDI Makassar. Kegiatan audit kinerja telah selesai dilaksanakan pada triwulan I, III dan IV serta hasilnya telah disampaikan ke satker masing-masing.

Consulting berupa Pendampingan/Pengawalan kegiatan Berisiko Tinggi dilaksanakan pada 4 satker yaitu Gedung Workshop pada Politeknik Petrokimia Cilegon, SMAK Bogor dan STTT Bandung dan Pusat Inovasi Desain Industri (PIDI) 4.0 Jakarta, yang dilaksanakan pada triwulan III. Laporan hasil pendampingan/pengawalan tersebut telah disampaikan pada pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Kinerja oleh Pimpinan merupakan kegiatan eselon 2 dilaksanakan dalam rangka mengkoordinir kegiatan pengawasan pada triwulan I, II, III dan IV terdiri dari reviu, monev, *consulting* dan audit cakupan tugas Inspektorat I.

Kegiatan pendukung indikator kinerja ini pada Inspektorat I telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian indikator ini adalah 100%.

2. Indikator kinerja; Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I

Indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun. Dari hasil temuan audit kinerja, rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti pada tahun 2019 sebanyak 0 temuan,

dari total rekomendasi hasil pengawasan cakupan tugas Inspektorat I, belum ada satupun satker yang menyatakan tidak dapat menindaklanjuti, sehingga hasil indikator ini dapat memenuhi target di bawah 5% yaitu 0%.

Perolehan data ini berkoordinasi dengan Bagian Tindak Lanjut, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Kementerian Perindustrian.

Kegiatan pendukung indikator kinerja ini pada Inspektorat I yaitu melakukan pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit pada 4 satker yaitu SMAK Bogor, AKA Bogor dan, STTT Bandung dan BPSDMI dilaksanakan pada triwulan IV. Laporan kegiatan pendampingan ini telah diselesaikan., sehingga capaian pada indikator ini 100%.

3. Indikator kinerja; Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti.

Pada triwulan IV sebagaimana dilaporkan Ketua Klinik Konsultasi bahwa Pengaduan Masyarakat Periode 1 September s/d 31 Desember 2020, terdapat sebanyak 182 pengaduan yang dilakukan secara *online* yang seluruhnya tidak terdapat pengaduan berkadar pengawasan, sehingga hasil indikator ini dapat tercapai.

Kegiatan pendukung dengan indikator ini yaitu Audit Dengan Tujuan Tertentu, yang dilaksanakan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri (BPSDMI) pada monev kegiatan diklat 3 in 1 dilaksanakan pada triwulan IV. Penyelesaian laporan kegiatan telah dilaksanakan, sehingga capaian untuk Indikator ini sebesar 100%.

4. Indikator kinerja; Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I.

Indikator ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan bagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Metode penghitungan indikator kinerja ini yaitu jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status sesuai rekomendasi (SR) maupun belum sesuai

rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi.

Total temuan Inspektorat I tahun 2020 pada satker cakupan Inspektorat I sebanyak 111 temuan; yang sesuai rekomendasi (SR) sebanyak 140 rekomendasi, sedangkan yang belum sesuai rekomendasi (BSR) sebanyak 42 rekomendasi. Dari data tersebut yaitu total temuan (111) dibagi dengan penjumlahan SR (140) dan BSR (42), diperoleh nilai sebesar 61%.

Untuk kegiatan pendukung indikator kinerja ini, kegiatan yang dilakukan Inspektorat I yaitu Monitoring dan Evaluasi. Pada tahun 2020 hanya melakukan Monev SAKIP, pelaksanaannya secara *online* pada seluruh satker cakupan tugas Inspektorat I.

Kegiatan monev yang dilaksanakan pada tahun ini adalah penilaian implementasi SAKIP pada satker cakupan tugas Inspektorat I sebanyak 37 unit kerja terdiri dari 30 satker pusat dan vertikal yaitu 12 politeknik, 9 sekolah menengah kejuruan dan 7 BDI, 3 unit eselon 2 di lingkungan BPSDMI yaitu Sekretariat BPSDMI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dan Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri serta 6 unit eselon 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu Biro Perencana, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Hukum, Biro Humas dan Biro Umum.

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II dan dapat terlaksana dengan baik, walaupun dengan cara *online* dan mengevaluasi dengan *zoom meeting*. Laporan kegiatan ini telah tersusun, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini pada Inspektorat I sebesar 100%.

Capaian kinerja untuk sasaran program/kegiatan **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) satker cakupan tugas Inspektorat I

Indikator ini berupa indeks penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I yang diperoleh dari nilai maturitas SPIP. Metode penghitungan dari hasil perolehan indeks Manajemen Risiko berdasarkan *quality assurance* BPKP terhadap satker cakupan tugas Inspektorat I. Nilai MRI dilakukan untuk unit eselon 1, untuk cakupan tugas Inspektorat I yaitu pada Sekretariat Jenderal dan BPSDMI. Sampai dengan laporan ini disusun nilai MRI masih dalam proses perhitungan dan evaluasi.

Target indikator kinerja ini adalah Level 3, sedangkan capaian untuk indikator cakupan tugas Inspektorat I masih dalam proses perhitungan dan belum dapat dievaluasi., sehingga untuk indikator belum dapat diukur.

Kegiatan pendukung indikator kinerja inipada Inspektorat I adalah kegiatan *Consulting* berupa Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko.

Kegiatan Pendampingan/Pengawasan dilaksanakan pada 7 unit kerja terdiri 1 unit Pusat yaitu BPSDMI dan 6 unit vertikal yaitu APP Jakarta, STMI Jakarta, AKA Bogor, STTT Bandung, SMAK Bogor, BDI Jakarta dan BDI Surabaya.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada triwulan III dan telah disusun laporannya, sehingga capaian untuk indikator ini 100%.

Capaian kinerja untuk sasaran program/kegiatan **Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan

Metode penghitungan indikator ini melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner. Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan tugas yang menjadi sampel kegiatan ini. Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang

menjadi cakupan yang menjadi sampel kegiatan ini. Dari data tersebut sebesar 97,2% stakeholder menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan standar pengawasan.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini berkoordinasi dengan Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Inspektorat Jenderal. Kegiatan pendukung indikator kinerja ini berupa Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I terdiri dari kegiatan Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya, Penyusunan LAKIP, serta kegiatan tambahan *Consulting* yaitu Pengawasan Pelaksanaan Program Percepatan Penanganan Covid 19.

Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya dilakukan berupa rapat-rapat koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal, serta penyusunan rencana aksi hasil evaluasi kegiatan pengawasan Inspektorat I pada laporan triwulanan.

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas dilaksanakan pada triwulan I, II, III dan IV yaitu tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Inspektorat I triwulan I II dan III tahun 2020, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I tahun 2020.

Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya, terdiri dari Pendampingan Penyusunan Renstra 2020-2024 pada 5 satker yaitu SMAK Bogor, AKA Bogor, STMI Jakarta, APP Jakarta dan BDI Jakarta, serta kegiatan lain dalam rangka mendampingi pimpinan pada kegiatan pengawasan cakupan tugas Inspektorat I.

Dengan kondisi pandemik covid yang terjadi di seluruh Indonesia, Inspektorat I merealokasi anggaran berupa tambahan kegiatan pada *Consulting* dalam bentuk Pengawasan Pelaksanaan Program Percepatan Penanganan Covid 19 dilaksanakan pada triwulan IV,

yang dilakukan pada 4 satker yaitu BDI Jakarta, STMI Jakarta, APP Jakarta dan BPSDMI.

Pada indikator ini tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan telah memenuhi standar pelaksanaan pengawasan, sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

2. Indikator kinerja; Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, sedangkan Inspektorat I tidak memiliki alokasi anggaran dan hanya berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Metode penghitungan indikator ini dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara dan RKAKL dengan kertas kerja terlampir.

Kegiatan teknik audit yang dilakukan Inspektorat I terhadap cakupan tugasnya telah berbasis komputer, dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara dan RKAKL. Penggunaan aplikasi tersebut cukup efektif bagi auditor Inspektorat I dalam penyelesaian kegiatan pengawasan. Namun dengan ketersediaan waktu, SDM dan anggaran yang mencukupi, penerapan TABK belum maksimal.

Indikator ini dapat terlaksana dengan baik dan capaian untuk indikator sebesar 100%.

Capaian kinerja untuk sasaran program/kegiatan **Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien** sebagai berikut:

1. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Tujuan kegiatan ini untuk memantau kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Kegiatan pendukung indikator kinerja ini yaitu Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Sampai dengan triwulan IV PKPT Inspektorat I tahun 2020 telah beberapa kali revisi. Pelaksanaan PKPT pada Inspektorat I telah beberapa kali mengalami penyesuaian pada triwulan I, II dan III, karena kondisi pandemik covid 19, kegiatan tetap dilaksanakan secara maksimal, baik secara *online* dengan menggunakan sarana *zoom meeting* maupun peninjauan langsung ke satker.

Capaian indikator kinerja secara keseluruhan telah sesuai dengan PKPT dan telah dilakukan penyusunan laporan kegiatan pengawasan, sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

Pada akhir triwulan IV, telah disusun PKPT Inspektorat I tahun anggaran 2021, sebagai pedoman/jadwal pelaksanaan kegiatan Inspektorat I selama 1 (satu) tahun.

Pada PKPT tahun anggaran 2021 mencakup 6 (enam) program kegiatan yaitu Audit Internal, Reviu, Monev, *Consulting*, Anggaran Satuan Kerja dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat I.

Indikator ini telah dilaksanakan, sehingga untuk capaian indikator ini sebesar 100%.

2. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Tujuan indikator ini agar dapat menganalisa beban pekerjaan dan dapat menyesuaikan peran pengawasan auditor dengan kompetensi yang dimiliki.

Kegiatan pendukung Indikator kinerja ini pada Inspektorat I yaitu Penyusunan Anggaran Tahun 2021.

Pada akhir triwulan IV 2020, Inspektorat I telah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan program kegiatan selama 1 (satu) tahun, terdiri dari 6 program yaitu; Audit Program Prioritas dan Program, Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran, Monitoring dan

Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri, *Consulting* dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I serta Evaluasi Kegiatan Inspektorat I.

Indikator ini telah dilaksanakan, sehingga untuk capaian indikator ini sebesar 100%.

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I pada triwulan IV, masih ditemukan beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan antara lain:

1. Kegiatan pengawasan ke satker vertikal mengalami penundaan/pergeseran yang diakibatkan pandemik covid 19 di seluruh Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian jadwal Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020;
2. Adanya realokasi anggaran BPSDMI dengan seluruh satker vertikal (sekolah dan balai diklat) serta Sekretariat Jenderal dengan seluruh Biro-Biro, sehingga perlu dilakukan revaluasi anggaran kembali;
3. Sampai saat terakhir laporan ini dibuat, masih terdapat perbedaan realisasi keuangan yang belum diinput dari bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal, sehingga realisasi keuangan dari aplikasi PP39 dengan e-Monitoring perbedaannya cukup signifikan.

D. Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada triwulan IV untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga realisasi anggaran di PP39 sesuai dengan realisasi anggaran sesungguhnya.

2. Meningkatkan koordinasi internal agar kegiatan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditetapkan.
3. Penjadwalan dan penganggaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi saat ini agar realisasi dapat tercapai sesuai target.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan IV Tahun 2020 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

A. Kesimpulan

1. Realisasi anggaran dan fisik kegiatan Inspektorat I sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2020 sesuai aplikasi PP39 sebagai berikut:
 - a. Realisasi penyerapan anggaran mencapai 86,76% atau sebesar Rp. 1.476.024.455,- dari target 100,00%.
 - b. Dari sisi realisasi fisik, tingkat capaiannya sebesar 99,37% dari target sebesar 100,00%.

Realisasi anggaran dan fisik kegiatan Inspektorat I sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2020 sesuai aplikasi *e-Monitoring* sebagai berikut:

- a. Realisasi penyerapan anggaran mencapai 99,65% atau sebesar Rp. 1.695.232.673,- dari target 100,00%.
 - b. Dari sisi realisasi fisik, tingkat capaiannya sebesar 99,37% dari target sebesar 100,00%.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi, namun dapat diselesaikan dengan baik. Upaya terhadap tingkat capaian, baik realisasi fisik maupun keuangan selalu dioptimalkan untuk mengacu kepada target yang telah ditetapkan.

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun

eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan IV Tahun 2020 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN - IV
TAHUN ANGGARAN 2020
INSPEKTORAT I

